

KONFLIK FAKSIONALISASI PARTAI DEMOKRAT DALAM KONGRES LUAR BIASA DELI SERDANG 2021

Rizky Emirhdhani Utama¹, Julian Aldrin Pasha Rasjid²

¹ Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Gedung A Kampus UI Kota Depok, 16424, Indonesia

² Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Gedung A Kampus UI Kota Depok, 16424, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: reuemirdu@gmail.com, japasha@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Konflik Faksionalisasi di tubuh Partai Demokrat dalam dinamikanya yang terjadi saat Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Deli Serdang Sumatera Utara tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami dinamika konflik faksionalisasi yang terjadi di Partai Demokrat selama Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang 2021. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji masalah serta sebagai alat bantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa hadirnya tokoh eksternal Partai Demokrat yaitu Bapak Jenderal TNI (purn) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang 2021 sebagai bentuk langkah reformasi para deklarator KLB atas arah Partai Demokrat yang sudah tidak lagi berjalan sebagaimana cita-cita para pendirinya. Perubahan kitab organisasi yang signifikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Demokrat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang 2021. Indikasi atas upaya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menjadikan Partai Demokrat menjadi Partai keluarga dapat dilihat dari perubahan ADART yang membentuk dan membahas secara khusus yaitu Majelis Tinggi Partai dalam postur struktural organisasi Partai Demokrat. Kendati demikian, tuduhan atas hadirnya sosok Bapak Jenderal TNI (purn) Moeldoko sebagai bentuk dari intervensi pemerintah dipatahkan dalam lembar pembahasan penelitian. Penelitian ini atas kedua teori tersebut meninjau aspek faksionalisasi berdasarkan kepentingan serta fenomena perubahan Partai Politik yang terjadi melalui aspek dinamika yang terjadi disebabkan oleh faktor internal.

Kata kunci:

Konflik Internal Partai Politik, Faksionalisasi Partai Politik, Partai Demokrat.

Keywords:

Internal Conflict of Political Party, Factionalization of Political Party, The Democratic Party

This study discusses the Factional Conflict in the Democratic Party in its dynamics that occurred during the Extraordinary Congress held in Deli Serdang, North Sumatra in 2021. The purpose of this study is to analyze and understand the dynamics of factionalization conflicts that occurred in the Democratic Party during the 2021 Deli Serdang Extraordinary Congress (KLB). The researcher uses a descriptive qualitative method to examine the problem and as a tool in answering research questions. The results of the research that have been carried out provide results that the presence of an external figure of the Democratic Party, namely Mr. General TNI (retired) Moeldoko in the 2021 Deli Serdang Extraordinary Congress as a form of reform steps for the KLB declarators on the direction of the Democratic Party which is no longer running as the ideals of its founders. Significant changes in the organizational book in the Articles of Association and Bylaws (ADART) of the Democratic Party are the main factors that encourage the occurrence of the 2021 Deli Serdang Democratic Party Extraordinary Congress. An indication of the efforts of the Central Leadership Council (DPP) of the Democratic Party to make the Democratic Party a family party can be seen from the changes in ADART which formed and discussed specifically, namely the Party's High Council in the structural posture of the Democratic Party organization. However, the accusation of the presence of the figure of TNI General (retired) Moeldoko as a form of government intervention was broken in the research discussion sheet. This research on both theories reviews the

aspect of factionalization based on interests and the phenomenon of change in political parties that occur through the aspect of dynamics that occur due to internal factors.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Keruntuhan dari era orde baru di Indonesia yang ditandai oleh tumbangnyanya rezim Presiden Soeharto menjadi lembaran baru bagi perjalanan sejarah politik di Indonesia. Lembaran baru ini menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia yang sempat terbatas gerakannya dalam beraspirasi, berorganisasi, dan berpolitik. Bergulirnya era reformasi diikuti dengan hadirnya perubahan-perubahan terhadap sistem politik dan sistem kepartaian di Indonesia. Perubahan sistem politik yang sebelumnya otoritarian kemudian digantikan menjadi sistem politik yang demokratis. Jumlah partai politik tidak lagi dibatasi oleh pemerintah, demikian juga dalam menentukan asas partai yang mulai diberikan keleluasaan dalam arah bergerak organisasinya (Fautanu, 2020).

Lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang salah satunya kebijakan tentang Partai Politik mulai dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Dengan disahkannya kebijakan baru tersebut menjadi awal tumbuh kembalinya sistem multipartai di Indonesia yang telah memberikan ruang luas bagi perkembangan partai politik di Indonesia (Fawzia et al., 2018). Mulai dari partai Islam (religious), partai nasionalis, dan juga partai yang memadukan nasionalis dengan religius yang saat ini yaitu Partai Demokrat. Lompatan yang berperan penting itulah yang juga menjadi cikal bakal dari cabang-cabang *Trias Politica* yang tidak luput dari keterlibatan partai politik di dalamnya.

Pada arti lain mengutip dari Fiman Noor pada tahun 2015, pentingnya partai politik digambarkan sebagai *omnipotent* dan *omnipresent* yang berarti bahwa partai politik dapat berperan dibanyak tempat (Noor, 2015). Kedudukan partai yang secara teoritis akan memberikan penguatan pada demokratisasi. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan serta penajaman fungsi partai politik. Namun dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan usaha dan orkestrasi dari seluruh kader yang menjaga cita-cita serta manifesto partai dengan arus realita yang belum berjalan maksimal (Jumadin & Wibisono, 2019).

Sistem multipartai pada saat itu, menurut pemikiran dari Lili Romli pada tahun 2008, belum berjalan optimal dikarenakan jumlah partai politik yang terlalu banyak (*hyper multiparties*) sehingga performa partai politik yang cukup mengecewakan publik (Haris, 2020; Romli, 2008). Pelaksanaan fungsi partai politik pun dinilai tidak berjalan maksimal. Selain itu elit partai politik lebih sering mempertontonkan kegaduhan yang timbul akibat tarik-menarik kepentingan yang bahkan terjadi pada internal partai. Alih-alih memberikan edukasi politik, menjalankan rekrutmen politik, menjadi pemadu kepentingan, meningkatkan partisipasi politik, melakukan kontrol politik, melaksanakan komunikasi politik dalam pengendalian konflik (Wasi, 2020).

Berkembangnya sistem multipartai pada era itu, dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah partai politik. Hal tersebut membuktikan adanya perubahan besar dalam kehidupan politik Paska Orde Baru yang sebelumnya dari ratusan partai yang lahir di era saat itu terdapat 48 partai yang kemudian menjadi peserta Pemilu pada tahun 1999. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang terlampau berbeda jika dilihat atau dibandingkan dengan pesta demokrasi sebelumnya yaitu Pemilu tahun 1997 yang diikuti hanya dengan 3 (tiga) partai politik saja.

Cita-cita besar dari lahirnya sistem demokrasi yang sejak lama menjadi tujuan dari banyaknya sejumlah partai baru yang hadir di awal reformasi. Demokrasi sebagai sebuah sistemlah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi partai politik untuk bisa mengambil peran utama atau peran pusat serta bisa menjadi bagian inti dari perkembangan demokrasi itu sendiri. Maka dari itu, menjadi kesimpulan yang rasional apabila Max Weber (1918) menyebutkan bahwa partai politik sebagai anak demokrasi.

Sistem Politik sebagai institusi menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam masyarakat demokratis. Partai politik di tengah-tengah masyarakat memiliki 3 (tiga) peran penting yang di antaranya; Peran partai politik sebagai jembatan antara keinginan masyarakat dengan pemerintah, peran partai politik untuk dapat menciptakan calon-calon pemimpin, dan keterlibatan partai politik ketika merumuskan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan harapan dan aspirasi masyarakat (Maarotong, 2020; Telaumbanua, 2018). Oleh sebab itu, partai politik memiliki peran yang mutlak agar demokrasi dapat berfungsi dengan semestinya.

Partai Politik itu sendiri secara fondasinya digerakan oleh semangat kelompok atau faksi. Faksi yang juga dikenal sebagai intra-partai, kehadiran faksi dalam tubuh partai politik sebagaimana pemikiran Harmel, dkk (2003) memberikan pengaruh terhadap identitas, postur serta struktur organisasi, dan dinamika pembuatan

keputusan internal partai. Faksi itu sendiri memilikiciri tersendiri yaitu merupakan anggota-anggota partai yang memiliki preferensi dan tujuan yang sama dengan tujuan partai, namun arti dari memiliki disini tidak berarti identik sama tujuannya dengan anggota-anggota partai lainnya.

Setiap anggota partai politik tentu memiliki tujuan yang sangat beragam dan keberpihakan yang tersendiri. Hal itu sebagai sebab dari setiap partai politik terdiri dari sub-grup atau intra partai yang mungkin memiliki nuansa kepentingan yang berbeda tetapi tetap teridentifikasi dalam satu label yang dinamakan partai. Pendapat dari Andrea Ceron terkait pengertian dari faksi sendiri bukanlah sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai istilah faksionalisasi yang memiliki makna lebih jauh sebagai proses dinamis dan dapat bertransformasi secara berulang sebagai respon atas insentif yang diperoleh.

Faksionalisasi sendiri secara keilmuan diartikan sebagaimana pemikiran dari Françoise Boucek memiliki tiga bentuk, yakni faksionalisasi bentuk kooperatif, faksionalisasi bentuk kompetitif, dan faksionalisasi bentuk degenaratif. Selain dari bentuknya, kehadiran faksi juga memiliki tujuan yang sangat beraga, yaitu: tujuan untuk mempertahankan patronase dan kontrol atas partai, tujuan mempengaruhi strategi dan kebijakan partai, serta tujuan untuk mengusulkan serangkaian nilai atau gagasan baru kepada garisbesar partai atau pada administrasi partai pada tahun 2009.

Faksionalisasi sering kali muncul dengan ditandai iklim kompetisi di internal partai meningkat. Konflik internal partai melekat dengan kemunculan faksi dikarenakan konflik tidak akan terbentuk bila tidak didahului oleh keberadaan faksi di dalam partai. Kelompok-kelompok yang tidak terlembagakan aspirasi serta kepentingannya akan memicu lahirnya faksi-faksi lain. Setelah terjadinya perbedaan kepentingan dan pandangan posisi politik, faktor lain yang dapat mempengaruhi yaitu pembentukan sejarah partai dan karakter para anggota serta elite partai.

Pendapat ahli terkait pemaknaan konflik oleh Patrick Kollner dan Matthias Basedau yang sering kali dinilai buruk di perspektif publik, namun dinamika yang terjadi dikenal sebagai gejala yang wajar dalam partai politik (2005). Dinamika inilah yang menjadikan partai politik tumbuh dengan ide-ide serta gagasan politik yang besar. Keberagaman dalam pengambilan keputusan di dalam internal partai juga dapat melahirkan anggota atau kader partai yang lihai dalam bernegosiasi, berkomunikasi, serta merancang strategi politik. Hal-hal ini merupakan kategori yang tidak dipisahkan dalam sistem demokrasi yang sangat mengedepankan aspirasi dan mekanisme diskusi. Partai Politik kedepannyaberjalan hanya sesuai dengan kehendak pemimpinya dan kemudian dianggap sebagai fenomena patologi politik.

Partai Demokrat merupakan partai politik yang dikenal sebagai partai personalistik dikarenakan sosok mantan ketua umum yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode waktu yaitu periode 2004-2009 dan 2009-2014. Faksi pertama kali hadir dalam tubuh demokrat di saat partai ini berencana untuk melaksanakan Kongres ke-II Partai Demokrat pada tahun 2010 silam. Faksionalisasi pertama kali hadir bersamaan dengan hadirnya sosok sentris dan muda Partai Demokrat yaitu Anas Urbaningrum. Berbeda pada Kongres ke-I Partai Demokrat yang berhasil menemukan titik kesepakatan (*consensus*), Kongres tahun 2010 ini harus berakhir dengandiselenggarakan Kongres Luar Biasa. Perjalanan panjang dari romantisme dinamika Partai Demokrat itu sendiri terus berlanjut sampai tergelarnya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara.

Kongres Luar Biasa yang biasa digunakan sebagai upaya pergantian ketua umum partai politik dalam sejarah kepartaian di Indonesia turut dirasakan Partai Demokrat sejak diselenggarakannya Kongres ke-II hingga bulan Maret 2021. Namun, pada Kongres Luar Biasa ini menjadi awal lahirnya faksi baru dalam benak Partai Demokrat. Pada saat yang bersamaan faksi baru ini tidaklah hadir dalam mekanisme rekrutmen atau pengkaderan internal Partai Demokrat. Fenomena inilah yang kemudian melatar belakangi penelitian ini agar menjadi sebuah produk penelitiandari pada pola yang tidak biasa dalam fenomena Konflik Faksionalisasi yang terjadi pada Partai Demokrat.

Unsur-unsur yang terlibat dalam polemik pelaksanaan Kongres Luar Biasa menjadi bagian terpenting dan menjadi mata pisau dalam penelitian ini. Pelaksanaan KLB yang terstruktur tidak terlepas dari perencanaan yang matang dari kader Partai Demokrat itu sendiri. Aktor dan elite partai Partai Demokrat memiliki posisi dan sikap yang berbeda yang kemudian bisa membawa pengaruh yang signifikan untuk masa depan serta arah Partai Demokrat ke depan. Motif serta keberpihakan yang mendasari para kader dalam pengambilan sikaplah yang menjadi landasan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang turut mengangkat tentang fenomena faksionalisasi partai politik beserta dengan dinamika konfliknya yaitu penelitian dari Aprilianto Satria Pratama (2021), Rizkyansyah, dkk (2020), Hilda Wahyuni, dkk (2017), Ahmad Zaki Fadlur Rohman (2017), dan Firdaus Ali Firmansyah (2015). Pada dasarnya dari kelima penelitian terdahulu tertuang sebuah kesamaan dalam garis besar pembahasan yaitu tentang fenomena faksionalisasi yang pernah terjadi di Partai Politik di Indonesia (Fadlurrohman, 2017; Firmansyah, 2015; Pratama, 2021; Wahyuni & Ayu, 2022). Aktivitas dari kajian literasi atas penelitian-penelitian terdahulu dilakukan agar dapat menjadi koridor dalam menemukan faktor pembeda dalam pembahasan dan kesimpulan

pada penelitian. Selain itu, dalam lembaran kajian literatur diharapkan dapat membantu pembaca dalam penggunaan teori dalam masing-masing penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami dinamika konflik faksionalisasi yang terjadi di Partai Demokrat selama Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang 2021. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik, peran aktor-aktor kunci dalam konflik tersebut, serta dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik utama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang digunakan oleh masing-masing faksi dalam upaya mereka untuk mencapai dominasi atau penyelesaian konflik. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang konflik internal partai politik di Indonesia, khususnya yang terkait dengan faksionalisasi dan dinamika internal partai. Kedua, dari perspektif praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi partai politik lainnya dalam menangani konflik internal agar tidak mengganggu stabilitas partai dan menjaga kepercayaan publik. Ketiga, bagi para pembuat kebijakan, temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam merancang regulasi atau kebijakan yang lebih efektif untuk mengelola konflik internal partai politik. Terakhir, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai kompleksitas politik internal partai, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses politik di Indonesia.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus pada studi kasus pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang 2021. Dalam studi ini peneliti akan menganalisa kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi lengkap menggunakan sejumlah prosedur pengumpulan data berdasarkan hal-hal yang terjadi pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang 2021. Kasus dibatasi dengan waktu dan aktivitas yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. (Creswell, 2016).

Jenis penelitian dalam studi ini dilakukan secara eksplanatif dengan tujuan untuk menerangkan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Penelitian dibangun berdasarkan riset eksploratif dan deskriptif yang kemudian beranjak kepada pertanyaan bagaimana dan dampak apa di balik peristiwa atau fenomena yang diteliti tersebut. Sumber data primer berasal dari wawancara mendalam terhadap pihak yang terlibat dan dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumentasi, seperti AD/ART, Pedoman Organisasi, surat keputusan dan instruksi ketua umum yang berhubungan dengan dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat DeliSerdang 2021. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang berasal dari artikel, arsip dan literatur lainnya serta publikasi secara elektronik yang membahas studi-studi tentang konflik faksionalisasi yang pernah terjadi dalam partai politik.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menjabat dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan pihak-pihak yang terlibat sebagai Kubu Moeldoko sebagai pihak yang kontra dengan kepemimpinan Partai Demokrat saat ini. Kriteria dalam memilih informan adalah orang-orang yang peneliti anggap memahami keadaan dan situasi pada Partai Demokrat dan memahami permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi dan data yang dapat dianalisa lebih mendalam. Terdapat sebanyak 8 (delapan) orang narasumber yang diwawancarai peneliti dengan berbagai sumber informasi, mulai dari pengurus inti Partai Demokrat, Eks Pengurus Partai Demokrat dan pengamat/akademisi.

Terdapat empat tahap analisa data dalam penelitian ini. *Pertama*, data dan informasi primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa beberapa dokumen pendukung yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. *Kedua*, data primer dan sekunder yang telah diperoleh tersebut disusun dan selanjutnya dianalisa dengan melakukan pencermatan untuk diketahui poin-poin utama yang akan digunakan dalam penelitian ini. *Ketiga*, poin-poin utama yang telah dicermati secara mendalam tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan penelitian. *Keempat*, hasil keseluruhan data-data yang telah di analisa secara mendalam tersebut, kemudian disusun dengan baik sehingga dapat menjadi hasil dan temuan penelitian yang memadai untuk memberikan kesimpulan dan dapat digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Konflik Faksionalisasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang Tahun 2021

Faksionalisasi adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap partai politik. Keberadaan faksi dalam partai politik menghadirkan dinamika dalam kehidupan partai baik dalam konteks dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Faksionalisasi yang dapat dikatakan positif apabila faksi yang ada berorientasi pada preferensi kebijakan dan memiliki semangat pelebagaan yang memiliki dampak baik kepada partai. Namun sebaliknya, faksi yang dapat dikatakan negatif apabila orientasi pada faksi yang ada bersandar pada pencarian sumber daya politik yang tidak diringi semangat pelebagaan (Kollner dan Basedau, 2005).

Partai Demokrat yang mengalami peristiwa konflik faksionalisasi yang terjadi dalam peristiwa Kongres Luar Biasa Deli Serdang pada tahun 2021. Tentunya peristiwa politik yang terjadi di antara kubu AHY dengan kubu Moeldoko tersebut bukan tanpa sebab. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadi proses Konflik Faksionalisasi di dalam Partai Demokrat di antaranya;

Pertama, adanya dinamika atas perubahan AD/ART Partai Demokrat yang menjadi salah satu faktor para inisiator KLB Partai Demokrat melakukan upaya-upaya untuk menurunkan posisi AHY sebagai Ketua Umum. AD/ART sebagai suatu bagian yang dianggap sangat penting dan krusial dalam organisasi, terjadi perubahan yang dianggap dilakukan secara sepihak saat pelaksanaan Kongres ke-V Partai Demokrat. Dalam kesempatan itu, ada beberapa poin yang diubah dan ditambahkan yaitu terkait Peran dan Fungsi dari Majelis Tinggi Partai (MTP)

“Tentunya sudah sangat jelas peristiwa Kongres ke-V Partai Demokrat sebagai bukti telah hilangnya kepercayaan diri SBY dalam memimpin dan mengendalikan Partai Demokrat. Sejak awal, kami melihat Partai Demokrat ibarat sebuah kapal tanpa nahkoda. Hal itu dikarenakan partai hanya terfokus kepada hal itu-itu saja, partai beserta pengurusnya terlalu asik di dalam, sampai lupa bahwa cita-cita besar partai ini adalah untuk dapat memenangkan pemilu kembali. Perubahan AD/ART yang dilakukan oleh pengurus, sebagai bukti pengurus DPP Partai Demokrat sudah paranoid dengan pengurus-pengurusnya sendiri. Padahal, saya yakini produk dari AD/ART pertama Partai Demokrat yang sebelum diubah adalah pemaknaan dari cita-cita besar partai ini” (wawancara langsung bersama dengan Penggagas KLB Deli Serdang, Darmizal).

Kedua, adanya dinamika terkait peran dan fungsi dari Majelis Tinggi Partai (MTP) DPP Partai Demokrat. Majelis Tinggi Partai Demokrat atau yang dikenal dengan sebutan lain MTP, adalah jabatan struktural dalam Partai Demokrat yang saat ini diketuai langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dibentuknya MTP beserta dengan tugas dan wewenangnya di dalam kepengurusan partai diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat. Persoalan MTP ini kemudian menjadi salah faktor terjadinya KLB 2021.

“MTP dari posisi ketua, sekretaris, hingga ke anggota diisi oleh orang-orang lama Partai Demokrat, orang-orang lama ini bukan hanya dilihat dari berapa lamanya saja mereka sudah tergabung ke dalam partai, namun juga dari seberapa besar dampak orang tersebut kepada partai. Sosok SBY sendiri, selain ia merupakan pendiri dari Partai Demokrat, beliau juga merupakan kader terbaik yang pernah dimiliki Partai Demokrat. Gimana tidak? Beliau adalah mantan Presiden RI. Ada nama lain yang lebih pantas dari SBY untuk mengisi posisi ketua MTP? Saya rasa tidak ada lagi. Jika ada yang menyampaikan bahwa berdirinya Partai Demokrat tidak memiliki hubungannya dengan pak SBY itu adalah kesalahan besar, besarnya partai ini karena pak SBY; tanggal berdiri, ideologi, lambang, bendera, nama, sampai kepada hymne dan lagu-lagu ya itu pak karya dari SBY.” (wawancara dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng).

Ketiga, adanya posisi yang strategis dari faksi besar yaitu faksi keluarga SBY. Faksi keluarga SBY yang sudah mendominasi struktur kepengurusan Partai Demokrat sejak pertama kali partai didirikan hingga sampai saat menyisakan 3 (tiga) posisi krusial yang diisi langsung oleh SBY sebagai Ketua MTP, AHY sebagai Ketua Umum, dan Ibas sebagai Wakil Ketua Umum.

Nama keluarga SBY lainnya yang mengisi dalam postur kepengurusan Partai Demokrat Periode 2010-2015 yang saat itu dikomandoi oleh Anas Urbaningrum yaitu anak nomor 2 (dua) dari SBY yaitu Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ibas kemudian dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai sekretaris jenderal (sekjend) DPP Partai Demokrat. Lebih daripada itu, beberapa anggota keluarga SBY lainnya yang masih merupakan sepupu dari SBY yaitu Sartono Utomo bersamaan dengan saudara ipar dari SBY yaitu Agus Hermanto, ditunjuk untuk mengisi posisi strategis dalam kepengurusan Partai Demokrat yaitu sebagai anggota Komisi Pemenangan Pemilu.

Keempat, menurunnya perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 menjadi salah satu sebab yang sering kali dikeluhkan oleh beberapa kader yang memang sudah sejak lama berada di

Partai Demokrat. Sebanyak dua kali masa pemilu Partai Demokrat lalui dengan SBY sebagai Ketua Umumnya, ternyata, tidak menjadi jaminan partai dapat mempertahankan masa kejayaannya. SBY yang pada saat itu merupakan mantan Presiden RI selama 2 (dua) periode, hanya mampu membawa Partai Demokrat memperoleh suara dalam pemilu 2014 yaitu 10,19% atau setara dengan 12.728.913 suara. Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, Fraksi Partai Demokrat DPR RI terpaksa harus kehilangan lebih dari 50% anggota DPR RI nya, dari 150 kursi di tahun 2009 menjadi 61 kursi di tahun 2014.

Berbeda pandangan yang disampaikan oleh Kamhar Lakumani, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat. Ketika diwawancarai oleh peneliti seputar faktor yang menyebabkan perolehan suara Partai Demokrat saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, Kamhar Lakumani menggambarkan bahwa roda kekuasaan itu ibarat sebuah roda yang berputar, terkadang bisa di atas, dan bisa di bawah (2024).

“Naik turunnya perolehan suara di Pemilu itu adalah hal yang biasa, persoalan naik dan turunnya suara tidak terjadi di Partai Demokrat saja. Bahkan Partai yang tergolong tua dan berpengalaman masih bisa mengalami kekalahan dalam pemilu (contoh: PDIP, Golkar, PKB, dan PPP). Justru hasil pemilu 2014 dan 2019 harus dijadikan bahan pelajaran yang baik untuk setiap insan kader Partai Demokrat. Karena berbicara loyalitas terhadap partai, tidak bisa diukur saat partai sedang di puncak saja. Ujian terberat para kader yaitu kemampuan bertahan di saat partai sedang mengalami waktu terburuknya. Seperti para aktor yang terliba dalam KLB Deli Serdang, mereka-mereka adalah contoh kader yang tidak tahan berdiri di luar dari kekuasaan (Wawancara langsung oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani)

Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai politik yang memiliki peran penting dalam sistem politik Indonesia, mengalami peristiwa konflik yang terancam pecah menjadi dua kubu yang bertikai antara pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jenderal TNI (purn) Moeldoko. Ancaman terjadi perpecahan ini menjadi momen krusial dalam perjalanan Partai Demokrat sebagai partai yang mengedapankan nilai nasionalis religius.

Jenderal TNI (purn) Moeldoko adalah sosok yang memiliki modalitas yang tinggi dikarenakan dirinya saat ini merupakan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus seorang purnawirawan TNI yang pernah berkarir sebagai pucuk kepemimpinan TNI yaitu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-18 sejak 30 Agustus 2013 sampai dengan 8 Juli 2015. Dengan latar belakang militer yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dianggap sebagai nilai tambah yang dapat mempengaruhi karakteristik kepemimpinan sebagai seorang elit di lingkungan terdekat Presiden (Nugroho, 2020).

Moeldoko sebagai seseorang elit dari kalangan purnawirawan TNI memegang posisi yang strategis untuk kemudian dapat mempengaruhi hasil dari keputusan politik dan lembaga politik secara sistematis dan terukur. Proses kaderisasi politik di era demokrasi untuk mengisi posisi sebuah lembaga politik terdapat prestasi asumsi tokratis yang melewati beberapa mekanisme seleksi yang terbentuk khusus untuk menjaring secara khusus individu-individu yang memenuhi syarat keahlian. Keahlian tersebut spesifik kepada kemampuan seseorang atas domain kebijakan atau merupakan masyarakat yang terbaik dan bijaksana (John & Best, 2010).

Modalitas yang dimiliki oleh Moeldoko sebagai purnawirawan TNI yang kemudian akan menjadi pelaku politik, diyakini mampu untuk memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam memainkan perannya secara optimal. Dalam kaitannya dengan posisi purnawirawan TNI, pengalaman dan serta keahlian yang didapat pada saat masih aktif dalam kemiliteran, memungkinkan purnawirawan TNI memiliki modalitas terbangun yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu ketika menjabat di pemerintahan sipil. Adapun modal yang dimaksud adalah modal budaya, modal sosial, modal ekonomi dan modal politik (Bourdieu, 2018).

Dinamika terlaksananya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serang diawali dengan tahapan kronfrontasi konflik internal Partai Demokrat sejak tanggal 1 Februari 2021. Pada saat itu Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono melaksanakan konferensi pers yang berlokasi di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Demokrat yang turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifky Harsyah, Ketua Dewan Kehormatan Hinca Panjaitan, Ketua Mahkamah Partai Demokrat Nahru Wiramli, dan dihadiri secara virtual oleh Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia (Fauzia Fadila dkk, 2022).

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan langsung oleh para petinggi DPP Partai Demokrat, AHY menyampaikan bahwa:

“Hal yang paling serius yang dibahas dalam rapat kepemimpinan yang diadakan oleh Partai Demokrat dimana adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). Gerakan ini melibatkan pejabat pemerintahan yang secara fungsional berada didalam lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo, lebih lanjut gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting dikalangan pemerintahan Presiden Joko

Widodo tentu kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Dalam permasalahan ini, karena itu, tadi pagi saya sudah mengirimkan surat secara pribadi kepada yang terhormat Balak Presdien Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini” (Naskah yang diucapkan oleh AHY dalam Konferensi Pers kepada awak Media pada 1 Februari 2021).

Konferensi Pers yang dilakukan terkait keberadaan Gerakan Pengambilalihan Pimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta Partai Demorot tersebut berlanjut dengan pemecatan secara tidak hormat kepada 7 (tujuh) kader Partai Demokrat karena keterlibatannya dalam mendukung kudeta tersebut. Atas keputusan pemecatan oleh DPP kepada 7 nama tersebut, disampaikan melalui rilis pers yang dilakukan oleh Herzaky Mahendra Putra yang merupakan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat tidak lama berselang setelah konfrensi pers yang dilakukan oleh AHY.

Pada saat itu nama Moeldoko tidak disebutkan secara terang-benderang oleh AHY dalam konfrensi persnya. AHY hanya menyebutkan dengan istilah pejabat pemerintah yang dekat dengan lingkaran kekuasaan yang dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Tudingan tersebut kemudian terkonfirmasi seiring tetap berjalannya pelaksanaan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara. Dampak dari konfrensi pers yang dilakukan AHY mendapatkan respon positif oleh Presiden Jokowi yang kemudian mengundang AHY untuk ke Istana Bogor pada tanggal 9 Maret 2021.

Dinamika Konflik Faksionalisasi Paska Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang

Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Moeldoko menjadi Ketua Umum KLB Demokrat versi KLB yang telah lama dinanti, yang akhirnya digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Sesuai ekspektasi banyak pihak, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat. Pesta KLB versi 2021-2026. Dalam pidatonya usai terpilih, Moeldoko mengajak semua untuk berjuang bersama demi meraih kembali kejayaan Partai Demokrat. Selain Moeldoko, KLB menetapkan Jhoni Allen sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat.

AHY mengatakan KLB ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Ada yang bilang KLB ini jelas-jelas tidak sah, ada yang bilang palsu, ada pula yang bilang palsu. Terminologi tersebut jelas ilegal dan inkonstitusional.

Kemenkum HAM memastikan hasil KLB Deli Serdang, sedangkan Demokrat pimpinan AHY meminta menolak permintaan kubu KLB. Pada akhirnya, Yasonna mengumumkan pemerintah menolak permintaan pengukuhan versi kepengurusan Partai Demokrat KLB Deli Serdang. Yasonna mengatakan, dari hasil verifikasi masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap antara lain dari perwakilan DPD, DPC, serta belum ada amanah dari ketua DPD dan DPC. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan permintaan konfirmasi terkait KLB ditolak 5 Maret 2021. Kemenkumham tidak berwenang mempertimbangkan perubahan AD/ART yang diajukan kubu KLB. Apabila KLB merasa AD/ART tidak sesuai dengan hukum partai politik, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan.

Drama kudeta Partai Demokrat berlanjut ke pengadilan dimana kubu KLB mengajukan beberapa gugatan ke pengadilan. Drama kudeta Demokrat bahkan merambah ke Mahkamah Agung (MA) ketika empat mantan Pemimpin Demokrat menggandeng pengacara Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi terhadap AD/ART Partai Demokrat. Saat itu, Yusril meminta MA melakukan kemajuan hukum dengan memeriksa, mengadili, dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat melanggar hukum atau tidak. Yusril berdalih AD/ART MA berwenang memeriksa parpol karena AD/ART merupakan partai berdasarkan perintah undang-undang dan pendelegasian yang diberikan UU Parpol. Namun upaya kubu KLB membawa persoalan Demokrat ke pengadilan menemui jalan buntu karena tuntutan hukum yang berulang kali mereka ajukan gagal.

Pada 10 November 2021, MA menyatakan tidak menerima uji materi AD/ART Demokrat karena tidak berwenang memeriksa isi permohonan dan memutusnya. AD/ART suatu partai politik bukanlah suatu norma hukum yang mengikat secara umum, melainkan hanya mengikat secara internal partai politik yang bersangkutan. Putusan Mahkamah Agung tersebut dinilai patut untuk dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, mendalam dan menyeluruh.

Selain itu, dua gugatan yang diajukan kubu KLB ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta juga ditolak. Gugatan pertama dilayangkan Moeldoko dan Jhoni Allen yang meminta PTUN Jakarta mengesahkan perubahan AD/ART dan susunan kepengurusan Partai Demokrat akibat KLB Deli Serdang. Tiga eks Demokrat yakni Ajrin Duwila, Yosef Benediktus Badeoda, dan Hasyim Husein mengajukan gugatan kedua yang meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut AD/ART Demokrat 2020 dan susunan kepengurusan Partai Demokrat 2020-2025. di bawah arahan AHY. PTUN Jakarta menolak kedua gugatan tersebut pada November dan Desember 2021. Sebaliknya, pada 18 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI Jakarta) menolak permohonan kasasi yang diajukan Jhoni terhadap AHY terkait pemecatan

Jhoni dari partai. Pada sidang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menolak gugatan yang diajukan Jhoni terhadap AHY.

Sebagai representasi dari berbagai identitas dan kepentingan yang berbeda, partai politik bukanlah organisasi yang homogen. Partai bersifat kolektif karena terbentuk dari koalisi beberapa pihak. Mereka tidak hanya mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama tetapi mereka juga mempunyai kepentingan individu. Setiap anggota partai mempunyai kesukaannya masing-masing, ambisi dan kepentingannya masing-masing, yang tentu saja tidak dapat didamaikan satu sama lain. Dengan latar belakang tersebut, terdapat tuntutan bagi anggota yang memiliki pandangan dan preferensi yang paling mirip atau paling dekat untuk berkumpul dan membentuk subkelompok atau faksi dalam suatu partai. Mengacu pada proses ini, partai dapat dianggap sebagai aliansi faksi (Ceron, 2019). Sartori (dalam Ceron, 2019) menyebut faksi sebagai kelompok kekuasaan yang dipersonalisasi dan berkomitmen penuh untuk memanipulasi kekuasaan (Ceron, 2019). Faksi ini dapat dibedakan menjadi faksi yang berorientasi ideologi dan faksi pragmatis. Sartori melihat faksi ideologis cenderung pragmatis dan ideologi dibatasi pada tujuan instrumental. Boucek pada tahun 2012, menyatakan bahwa faksionalisme adalah proses pembagian subkelompok dengan ciri-ciri khusus tertentu (Jauchar et al., 2022). Perbedaan sikap, kepentingan dan ambisi dapat menimbulkan persaingan dan faksionalisme. Sebuah faksi memiliki dua ciri penting: Pertama, merupakan subgrup yang merupakan bagian dari grup yang lebih besar; dan kedua, subkelompok disatukan oleh identitas dan tujuan bersama.

Faksionalisasi yang menggerogoti tubuh partai tidak bisa dihindari ketika partai terbentuk dari kekuatan struktur sosial, sistem kepartaian, seleksi internal pengurus, dan gaya kepemimpinan partai yang cenderung elitis atau eksklusif. Stabilitas internal partai politik sangat bergantung pada sejauh mana demokrasi antar partai, mendorong fraksi untuk mampu bekerja sama mengelola kepentingan internal dan sebagai perantara kebijakan publik antara masyarakat dan pemerintah. Namun konflik dan perpecahan internal partai tidak bisa dihindari ketika pengurus tidak mampu membangun sistem internal yang seimbang, bahkan minoritas partai lebih mengutamakan pencarian keuntungan. Dalam kondisi seperti ini, hal ini akan mendorong faksi-faksi untuk bersaing karena mencari keuntungan seringkali mendorong konflik internal. Jika persaingan dapat dikendalikan dengan baik, maka keberlangsungan dan kelangsungan hidup partai politik dapat tetap terjaga.

Dampak positifnya adalah faksi-faksi yang bersaing dapat menemukan tingkat demokrasi antar partai dengan tetap menjaga keseimbangan kekuatan internal dan mampu memulihkan kondisi politik ketika persaingan terjadi. Namun, partai-partai bisa mengalami kemunduran, atau bahkan bangkrut, ketika mereka kalah dalam pemilu ketika persaingan internal antar faksi telah berubah menjadi kerusuhan yang tidak terkendali. Bahkan koalisi faksi pun tidak stabil, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas antar partai yang mematikan dan kebijakan publik partai yang bias. Kondisi ini hanya bisa diatasi jika seluruh faksi yang bertikai kembali mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam suatu partai guna mengembalikan kondisi kepartaian pada tingkat kepartaian yang stabil dan terintegrasi antar subkelompok partai.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai konflik faksionalisasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang 2021 menunjukkan bahwa faksionalisasi merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam partai politik. Konflik ini dapat bersifat positif jika faksi-faksi berorientasi pada kebijakan dan pelebagaan yang baik, tetapi bisa negatif jika hanya mengejar sumber daya politik tanpa semangat pelebagaan. Konflik antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko dalam Partai Demokrat dipicu oleh perubahan sepihak pada AD/ART partai, peran dan fungsi Majelis Tinggi Partai (MTP), dominasi keluarga SBY dalam struktur partai, serta penurunan perolehan suara dalam pemilu. Keputusan pemerintah yang menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang dan serangkaian gugatan hukum yang diajukan kubu KLB gagal mengubah status kepemimpinan partai. Konflik internal ini menggambarkan tantangan yang dihadapi partai politik dalam menjaga stabilitas internal dan menjalankan nilai-nilai demokrasi, menunjukkan bahwa pengelolaan faksi dan kepentingan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup partai politik.

REFERENSI

- Ceron, A. (2019). *Leaders, factions and the game of intra-party politics*. Routledge.
- Fadlurrohman, A. Z. (2017). Problem Pelebagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*, 3(2), 16–30.
- Fautanu, I. (2020). *Partai Politik di Indonesia*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Fawzia, D., Noor, F., Bhakti, I. N., Gayatri, I. H., Nurdin, N., Bahar, S., Siregar, S. N., Haris, S., & Jati, W. R. (2018). *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmansyah, F. A. (2015). Wajah Faksionalisasi di Tubuh Partai Demokrat. *Jurnal Transformative*, 1(1), 44–54.
- Haris, S. (2020). *Menuju Reformasi Partai Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jauchar, B., Jumansyah, J., & Hidayati, A. (2022). Faksionalisasi Partai Politik Golkar Di Kalimantan Timur Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 192–212.
- Jumadin, Z., & Wibisono, Y. (2019). Konflik Politik Antara Gubernur Dan DPRD DKI Jakarta Dalam Proses Penetapan APBD 2015. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 249–303.
- Maarotong, J. (2020). Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 8(4).
- Noor, F. (2015). Perpecahan & solidaritas partai Islam di Indonesia: kasus PKB dan PKS di dekade awal reformasi. (No Title).
- Pratama, A. S. (2021). Memahami Faksionalisme Sebagai Unsur Inheren Bagi Dinamika Partai Politik. *Jurnal Wacana Politik*, 6(2).
- Romli, L. (2008). Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. *Jurnal Politika*, 6(1), 7.
- Telaumbanua, K. K. (2018). *Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli*.
- Wahyuni, H., & Ayu, R. F. (2022). Faksi dan Konflik Politik Dalam Partai Politik: Partai Keadilan Sejahtera. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 15(1), 79–92.
- Wasi, I. (2020). *Politik, Partai Politik, Dan Perempuan Frontstage And Backstage Sebuah Catatan*. Deepublish.